



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 15 /DPR RI//2023-2024

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *juncto* Pasal 66 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* Pasal 40 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024;
 - b. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2023 telah menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024;
 - c. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668);
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-7 tanggal 3 Oktober 2023 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2024.**
- PERTAMA** : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Para Ketua Fraksi : FPDJ Perjuangan, FPG, F-PGERINDRA, FNASDEM, FPKB, FDEMOKRAT, FPKS, FPAN, dan FPPP;

8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Para Deputi, Inspektur Utama, dan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Oktober 2023

KETUA



Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : /DPR RI//2023-2024

TANGGAL : 3 Oktober 2023

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2024**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR (KOMISI I)	<ul style="list-style-type: none">• Proses penyusunan• Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none">• RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi II• Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.	DPR (KOMISI II)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	DPR (KOMISI III)	<ul style="list-style-type: none">• Proses penyusunan• Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR (KOMISI IV)	<ul style="list-style-type: none">• RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi IV• Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	DPR (KOMISI V)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR (KOMISI VI)	<ul style="list-style-type: none">• RUU dalam tahap Harmonisasi di Badan Legislasi• Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	DPR (KOMISI VI)	<ul style="list-style-type: none">• Proses penyusunan• Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan).	DPR (KOMISI VII)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi VII • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR (KOMISI VIII)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	DPR (KOMISI IX)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Harmonisasi • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	DPR (KOMISI X)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • SurPres sudah disampaikan ke DPR RI • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman.	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia).	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
21.	RUU tentang Pertekstilan.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	DPR/ PEMERINTAH	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi VIII • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	DPR/DPD	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psicotropika (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi I • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Pansus • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • SurPres sudah diterima DPR • Proses Pendalaman di internal Pemerintah • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi II • Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai.	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
43.	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian.	PEMERINTAH	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
44.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional.	PEMERINTAH	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
45.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DPD	<ul style="list-style-type: none"> • RUU memasuki proses pembicaraan Tk. I di Pansus • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
46.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.	DPD	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Pansus • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
47.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.	DPD	<ul style="list-style-type: none"> • RUU memasuki proses pembicaraan Tk. I di Komisi X • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

KETUA,



Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI